

TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LEVEL OF COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN GENERAL ELECTIONS IN  
TEMANGGUNG DISTRICT

Dwanda Julisa Sistyawan\*

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jalan Dr. Antonius Suroyo Semarang 50275, Indonesia

INFO ARTIKEL

*Riwayat Artikel:*

Diterima : 01 Mei 2024

Disetujui : 21 Juli 2024

*Keywords:*

political participation; general elections; voting behavior

*Kata Kunci:*

partisipasi politik; pemilihan umum; perilaku memilih

*\*) Korespondensi:*

E-mail: [dwanda.js@gmail.com](mailto:dwanda.js@gmail.com)

**Abstract:** this study aims to analyze the level of participation and factors that affect the level of political participation of the people of Temanggung Regency in the general election. This study uses a normative legal method with a conceptual approach. The results of the study show that the level of political participation of the people of Temanggung Regency in the general election is very high. This is evidenced by the public's trust in making choices and the active participation of the community to occupy functional positions in the political system. The level of public trust in Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Ngadirejo, and Tretep Districts reached 100 percent, Wonoboyo District by 96.7 percent, and Kaloran District, only 30 percent of people believe in the importance of participation in the general election. Factors that affect the level of political participation of the people of Temanggung Regency in the general election are sociological, psychological, ethnic, ideological, religious, political literacy, and economic conditions.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan masyarakat dalam menentukan pilihan serta adanya partisipasi aktif masyarakat untuk menduduki jabatan fungsional dalam sistem politik. Tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Ngadirejo, dan Tretep mencapai 100 persen, Kecamatan Wonoboyo sebesar 96,7 persen, serta Kecamatan Kaloran hanya 30 persen masyarakat yang percaya akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum yaitu faktor sosiologis, psikologis, etnisitas, ideologi, agama, literasi politik, serta kondisi ekonomi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Konsepsi kedaulatan rakyat oleh para pendiri bangsa menjadi kesepakatan pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah pembukaan

alinea keempat memberikan pernyataan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diatur dalam undang-undang dasar yang membentuk negara republik Indonesia dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diimplementasikan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Asas demokrasi yang termuat dalam UUD NRI 1945 memuat syarat-syarat negara. Hubungan asas demokrasi

dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga memberikan arti bahwa kekuasaan yang dibagi-bagikan berdasarkan fungsi, wewenang, dan kedudukan di dalam satu negara (Mahfud, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa paham demokrasi dianut dalam negara tersebut bukan negara yang bersifat monarki maupun pemerintahan diktator.

Pemilihan umum merupakan mekanisme yang penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Warga negara melalui Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan yang akan mengawasi pemerintahan, mewakili aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang, serta menyusun anggaran untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut (Irawan, Agung, dan Pranacitra, 2024). Implementasi Pemilu juga merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan (Prayoga dan Yuhertiana, 2021). Partisipasi masyarakat mencerminkan terlaksananya negara yang demokratis.

Keterlibatan politik masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah unsur utama dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik dalam konteks demokrasi memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan dimata masyarakat. Partisipasi politik dalam konteks Pemilu mempengaruhi legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kandidat atau pasangan calon yang terpilih. Preferensi dan kepentingan setiap individu mempengaruhi pilihan dalam Pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu juga dianggap sebagai mekanisme evaluasi dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan yang terpilih (Liando, 2016). Hal ini menyatakan bahwa pejabat publik yang terpilih dalam Pemilu sangat bergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Kabupaten Temanggung terletak di Provinsi Jawa Tengah berada di wilayah pegunungan Sumbing dan Sindoro yang terdiri atas 20 kecamatan. Kabupaten Temanggung memiliki sejarah partisipasi politik yang tinggi yaitu selalu di atas 80% sejak Pemilu 1999. Hal ini merupakan suatu prestasi mengingat rata-rata partisipasi di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah berada di bawah angka tersebut (Fitriyah, Alfirdaus, dan Manar, 2021). Pemerintah daerah

di Kabupaten Temanggung memiliki peran krusial dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan termasuk musyawarah perencanaan pembangunan. Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan penduduk dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal melalui penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat (Sari, Amri, dan Yusnita, 2021). Dukungan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting. Hal ini dapat diperkuat dengan menerapkan teknologi informasi seperti *e-government*. Penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi serta mempermudah keterlibatan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur (Guntoro, Abadi, dan Prajarto, 2014). Pendidikan pemilih juga memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran politik yang diperlukan (Malik, Syaripuddin, dan Harianto, 2022). Pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung dapat mengoptimalkan proses Pemilu dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam kontestasi Pemilu merupakan topik yang penting dalam konteks pengembangan demokrasi lokal. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu sangat penting untuk memperkuat kesadaran politik, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah (Dunggio, Swastiani, dan Yantu, 2021). Kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Hemafitria, Novianty, dan Fitriani, 2021). Pemberian dari Calon Legislatif (Caleg) di sisi lain juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku memilih masyarakat. Pemberian kolektif seperti bantuan sosial, pembangunan masjid, dan bantuan modal memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pemberian individual berupa uang. Informasi dan bantuan yang diberikan oleh Caleg sering menjadi referensi utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan politik. Pengalaman informasi yang diperoleh melalui media sosial juga krusial dalam membentuk pemahaman politik pemilih, terutama dalam

menentukan pilihan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden (Hasanuddin, dkk., 2021; Prasetyawan, 2020). Hal ini mengakibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam Pemilu tidak hanya meningkatkan partisipasi politik tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih. Keterlibatan ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang ada, sehingga menjaga integritas proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kajian ini membahas tentang tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pemilu serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung yang diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perilaku memilih masyarakat. Hal ini penting untuk mengoptimalkan proses Pemilu dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi dapat terwujud dengan lebih baik. Ketercapaian partisipasi masyarakat memiliki dampak yang sangat besar bagi penentuan masa depan suatu bangsa.

## METODE

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder seperti buku, perundang-undangan, makalah ilmiah, serta hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam kontestasi Pemilu. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan masalah kajian. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum

Pemilu dalam konteks demokrasi tercermin dalam UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilu juga dianggap sebagai pesta demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang tepat untuk memimpin, sehingga kesadaran politik dan partisipasi dalam proses politik sangat diperlukan (Lukman, dkk., 2024). Pemilu dalam konteks hukum di Indonesia diatur secara yuridis sebagai instrumen penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilihan langsung pertama kali diterapkan pada tahun 2004 dan dianggap sebagai cara demokratis untuk membentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan perwakilan (Irawan, dkk., 2024). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memegang peran penting dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu (Yuhandra, dkk., 2023). Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan Pemilu.

Pemilu merupakan suatu instrumen praktis untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu meskipun bukan menjadi satu-satunya cara pelaksanaan demokrasi, melainkan hanya merupakan alat untuk memilih perwakilan parlemen dan pemimpin eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Tujuan utama bangsa dan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan pendidikan bagi seluruh warga, seperti yang dijelaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945 (Sahbana, 2017). Keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari seberapa baik pemimpin yang terpilih mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung kemakmuran dan pendidikan masyarakat. Pemilu yang berkualitas harus mampu menghasilkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan juga menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Pemilu bukan tujuan akhir dari demokrasi melainkan hanya sebagai alat untuk memilih perwakilan parlemen dan pemimpin eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Tujuan utama negara yang termuat dalam UUD NRI 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan pendidikan bagi seluruh warga (Anugerah, 2022). Pemilu juga menjadi barometer kesehatan demokrasi dalam suatu negara. Keberhasilan Pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel dapat

membantu memajukan dan memperkuat struktur demokrasi. Hal ini menuntut untuk memastikan bahwa proses Pemilu dijalankan dengan adil dan transparan untuk menghindari manipulasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Pemilu di Indonesia tidak hanya sebagai mekanisme pemilihan tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan rakyat secara luas.

Warga negara melalui Pemilu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih pemimpin, dan mempengaruhi kebijakan publik yang merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan demokrasi sebuah negara. Pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat (Wardhani dan Sukma, 2018). Partisipasi politik dalam Pemilu dapat membawa warga negara dalam mengekspresikan aspirasi serta berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Partisipasi pemilih dalam Pemilu juga merupakan indikator legitimasi warga negara terhadap pemerintahan yang terpilih (Srikandi dan Wijaya, 2024). Pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Partisipasi politik merujuk pada aktifnya seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan politik yang meliputi pemilihan pemimpin negara yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kebijakan pemerintah. Partisipasi politik juga melibatkan tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri pertemuan umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, serta berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Hal ini merupakan keterlibatan sukarela warga dalam proses pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan publik (Akhrani, Imansari, dan Faizah, 2018). Partisipasi politik yang aktif dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Warga negara yang terlibat dalam kegiatan politik dapat menyuarkan aspirasi dan kepentingan, serta mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran politik dan pengetahuan warga negara tentang isu-isu penting yang mempengaruhi

kehidupan sehari-hari. Partisipasi politik yang inklusif dan luas juga dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan lebih baik dalam menangani kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dikarenakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan. Penekanan pentingnya mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu karena tingkat partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan suatu Pemilu (Arniti, 2020). Kajian terdahulu dalam konteks partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan, seperti pencegahan kebakaran lahan, dapat disebabkan oleh rendahnya keanggotaan kelompok bagi masyarakat (Amin, Ikramatoun, dan Halik, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor internal dalam masyarakat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam konteks Pemilu. *Stakeholders* memegang peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program-program pembangunan (Oktavia dan Saharuddin, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif pembangunan, termasuk dalam konteks Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa pemberian bantuan dari Caleg memiliki dampak signifikan terhadap pilihan politik masyarakat. Pemberian kolektif seperti bantuan sosial dan pembangunan fasilitas umum lebih dihargai oleh masyarakat dibandingkan pemberian individual berupa uang. Informasi yang disebarkan oleh Caleg melalui berbagai media, terutama media sosial turut membentuk pemahaman politik dan preferensi pemilih (Hasanuddin, dkk., 2021). Tingginya tingkat partisipasi pemilih di Temanggung yang selalu di atas 80% sejak Pemilu 1999 mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap proses politik tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap pemerintahan yang terpilih. Keberhasilan Pemilu di Temanggung dapat menjadi indikator penting dalam menilai

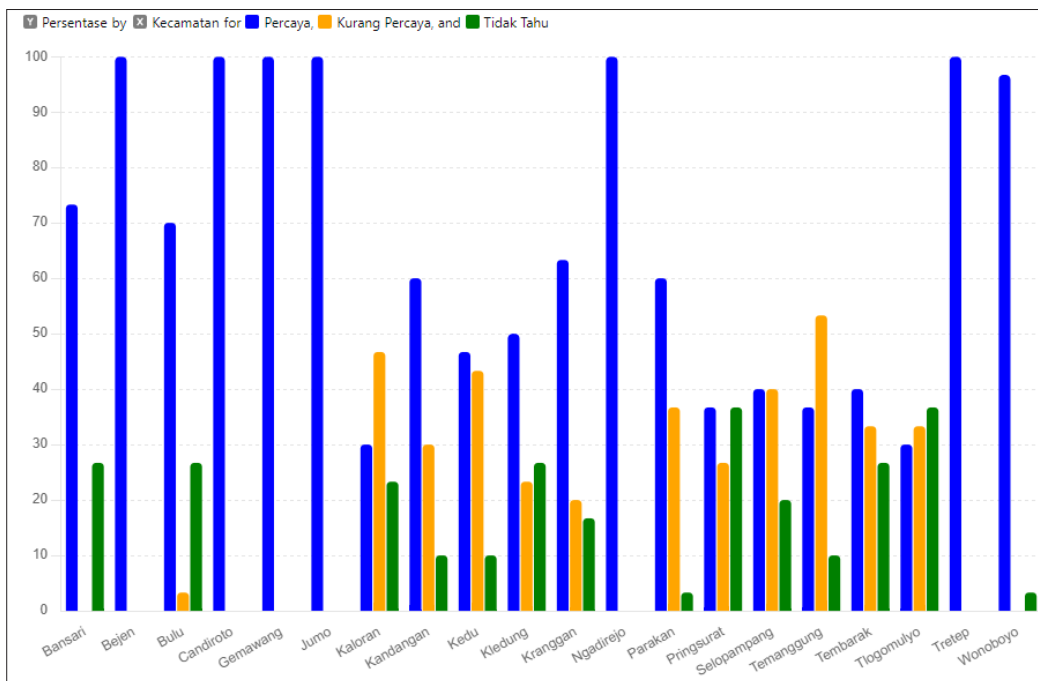
kualitas demokrasi lokal dan upaya untuk mencapai tujuan utama negara, yaitu kesejahteraan umum dan kemajuan pendidikan.

Partisipasi politik masyarakat sangat berkaitan dengan sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partisipasi kolektif untuk menetapkan arah, visi masa depan, serta menentukan pemimpin (Hemafitria, dkk., 2021). Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan hak penuh masyarakat di daerah dengan memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Pemilu diikuti oleh partai politik yang mewakili berbagai kepentingan warga negara mencakup kepentingan agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, dan antikorupsi yang sering diangkat dalam kampanye politik. Tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Temanggung terhadap pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum disajikan pada gambar 1.

Berdasarkan data yang disajikan dalam gambar 1 memperlihatkan bahwa sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu Kecamatan Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Ngadirejo, dan Tretep memiliki persentase tingkat kepercayaan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Ngadirejo, dan Tretep mayoritas

telah percaya bahwa partisipasi politik dalam pemilihan umum sangat penting. Masyarakat di Kecamatan Wonoboyo juga memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi yaitu sebesar 96,7%, dengan 3,3% masyarakat menyatakan tidak tahu akan pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum. Tingkat kepercayaan menengah terlihat di Kecamatan Bansari, Bulu, Kranggan, Parakan, Kandangan, dan Kledung. Masyarakat di Kecamatan Bansari dengan persentase 73,3%, Kecamatan Bulu dengan persentase 70%, Kecamatan Kranggan dengan persentase 63,3%, Kecamatan Parakan dan Kandangan dengan persentase 60%, serta Kecamatan Kledung dengan persentase 50% menyatakan percaya bahwa partisipasi politik sangat penting dalam pemilihan umum.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum yang cukup rendah dengan persentase kurang dari 50% ada di Kecamatan Kedu, Selopampang, Tembarak, Temanggung, Pringsurat, Kaloran, dan Tlogomulyo. Masyarakat di Kecamatan Kedu dengan persentase 46,7% menyatakan percaya, 43,3% menyatakan cukup percaya, dan 10% menyatakan tidak tahu. Masyarakat di Kecamatan Selopampang dengan persentase 40% menyatakan percaya, 40% menyatakan cukup percaya, dan 20% menyatakan tidak tahu sedangkan masyarakat di Kecamatan Tembarak dengan persentase



**Gambar 1** Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Temanggung terhadap Pentingnya Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum

40% menyatakan percaya, 33,3% menyatakan cukup percaya, dan 26,7% menyatakan tidak tahu. Masyarakat di Kecamatan Temanggung dengan persentase 36,7% menyatakan percaya, 53,3% menyatakan cukup percaya, dan 10% menyatakan tidak tahu sedangkan masyarakat di Kecamatan Pringsurat dengan persentase 36,7% menyatakan percaya, 26,6% menyatakan cukup percaya, dan 36,7% menyatakan tidak tahu. Masyarakat di Kecamatan Kaloran dengan persentase 30% menyatakan percaya, 46,7% menyatakan cukup percaya, dan 23,3% menyatakan tidak tahu sedangkan masyarakat di Kecamatan Tlogomulyo dengan persentase 30% menyatakan percaya, 33,3% menyatakan cukup percaya, dan 36,7% menyatakan tidak tahu.

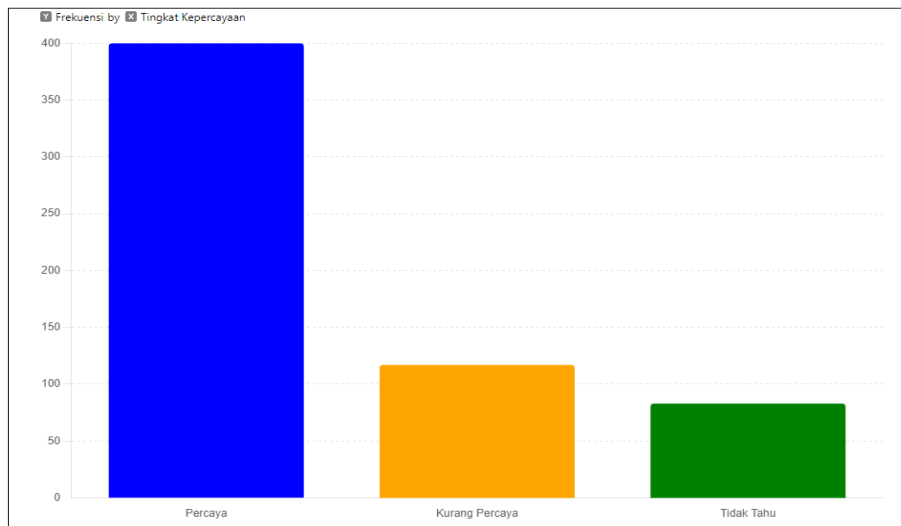
Partisipasi politik dalam Pemilu merupakan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi sekaligus sebagai indikator keberhasilan dari penyelenggaraan Pemilu (Wardhani dan Sukma, 2018). Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan (Arniti, 2020). Keterlibatan kelompok disabilitas dalam Pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap kepemimpinan yang berkualitas (Angelita dan Arifin, 2023). Partisipasi tidak hanya tentang kehadiran fisik di tempat pemungutan suara tetapi mencakup elemen-elemen seperti kompetisi, integritas, dan legitimasi dalam Pemilu (Hasanuddin, Marta, dan Asrida, 2021). Partisipasi dalam Pemilu memuat aspek-aspek edukasi politik bagi masyarakat agar mampu memahami hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Edukasi politik ini dapat meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya peran pemilih dalam menentukan arah kebijakan negara. Partisipasi aktif dalam Pemilu menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi dan membangun pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum disajikan dalam gambar 2.

Berdasarkan data yang disajikan dalam gambar 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Temanggung telah mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu karena percaya terhadap pentingnya

partisipasi politik. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 400 responden dengan persentase 66,7% menyatakan percaya, sebanyak 117 responden dengan persentase 19,5% menyatakan kurang percaya, serta sebanyak 83 responden dengan persentase 13,8% menyatakan tidak tahu terhadap pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum. Tingkat keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proses demokrasi (Amin, Ikramatoun, dan Halik, 2021; Arniti, 2020). Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pemilu salah satunya disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, pemahaman tentang pentingnya Pemilu yang masih minim, serta adanya persepsi yang menganggap bahwa hasil Pemilu tidak mempengaruhi kehidupan (Kusuma, Raka, dan Sumada, 2022). Partisipasi masyarakat dalam Pemilu mempengaruhi proses pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum berdasarkan hierarki partisipasi politik yang dikemukakan menunjukkan bahwa pada puncak hierarki. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi aktif yang dilakukan masyarakat dalam menduduki jabatan fungsional dalam sistem politik (Rush dan Althoff, 2003). Hierarki partisipasi politik Rush dan Althoff tertinggi adalah keberhasilan menduduki jabatan politik atau administratif, sedangkan hierarki terendah yaitu voting atau pemberian suara oleh masyarakat. Pemilihan umum yang dianggap penting telah merepresentasikan adanya implementasi partisipasi politik yang tinggi.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu dipengaruhi oleh strategi komunikasi politik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu juga dapat dipengaruhi oleh ekonomi lokal (Huda, Winarto, dan Lestariningsih, 2022; Wardhani dan Sukma, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat terwujud melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang visi, misi, dan program kerja calon kepala daerah (Kause, 2020). Keterlibatan politik masyarakat dalam Pemilu dapat dievaluasi dari sudut pandang gender salah satunya yaitu partisipasi politik pemilih wanita di berbagai wilayah di Indonesia (Rasyadi dan Nasdian, 2021).



**Gambar 2** Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Temanggung harus diperkuat melalui pendidikan politik yang lebih efektif.

Kerangka demokrasi yang melibatkan pemilihan, keterlibatan politik dalam proses Pemilu menjadi krusial sebagai indikator legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan yang terpilih melalui proses demokratis tersebut. Faktor-faktor seperti pengenalan sosial, edukasi politik, dan ketersediaan akses memegang peran utama dalam meningkatkan keterlibatan pemilih, terutama di antara pemilih baru dan kelompok marginal seperti komunitas adat atau individu dengan disabilitas (Amrullah, Subhilhar, dan Amin, 2021; Mahpudin, 2020). Partisipasi yang lebih inklusif dan representatif diperlukan upaya yang berkesinambungan dalam membangun kesadaran dan pengetahuan politik di kalangan masyarakat. Program-program edukasi politik yang dirancang secara khusus untuk menysasar kelompok-kelompok marginal dapat membantu mengatasi hambatan yang dihadapi dalam berpartisipasi dalam Pemilu. Penyediaan akses yang lebih baik seperti tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas dan informasi Pemilu yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dapat mendorong peningkatan partisipasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong keterlibatan politik yang aktif dari semua warga negara, sehingga tercipta proses Pemilu yang benar-benar demokratis dan inklusif.

Pengenalan informasi tentang Pemilu bisa menjadi cara yang efisien untuk meningkatkan

kualitas keterlibatan politik. Pentingnya integritas dalam penyelenggaraan Pemilu juga tidak bisa diabaikan. Kapasitas dan integritas penyelenggara Pemilu sama pentingnya dengan kerangka hukum yang mengatur aturan main Pemilu (Heriyanto, dkk., 2023; Mahyudin, dkk., 202). Penggunaan teknologi dalam Pemilu juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan warga negara dan partisipasi dalam proses Pemilu (Arifin, 2023). Partisipasi dalam Pemilu dengan demikian tidak hanya tentang kehadiran fisik di tempat pemungutan suara, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti sosialisasi, integritas, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan baik, mewakili kehendak rakyat, dan menghasilkan pemerintahan yang sah dan berkualitas.

Penting untuk memperhatikan inklusi sosial dalam proses Pemilu, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan yang terpinggirkan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Peningkatan partisipasi politik dapat dicapai dengan menghilangkan hambatan-hambatan struktural dan sosial yang menghalangi akses kelompok-kelompok ini ke proses Pemilu. Hal ini dicontohkan penyediaan informasi Pemilu dalam berbagai bahasa dan format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, serta pelatihan khusus bagi petugas Pemilu untuk menangani kebutuhan khusus pemilih, dapat memperluas partisipasi. Kebijakan afirmatif juga dapat diberlakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok minoritas

dalam politik, baik sebagai pemilih maupun kandidat. Partisipasi yang inklusif tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih, tetapi juga memperkaya proses demokrasi dengan perspektif yang lebih beragam.

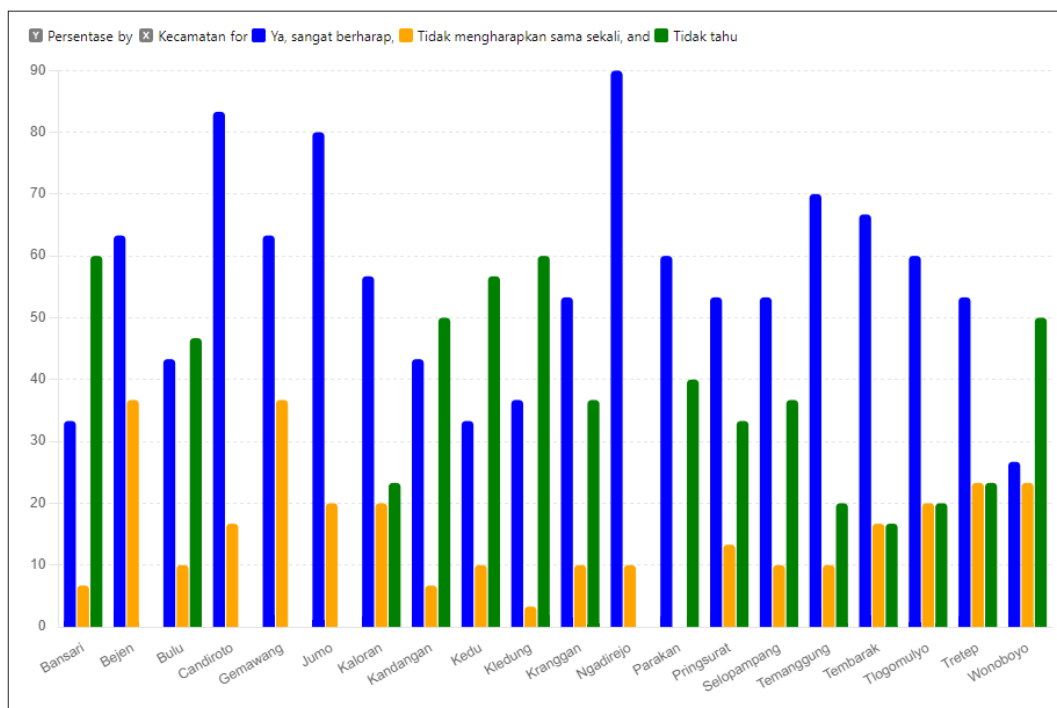
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Temanggung tidak hanya terbatas pada faktor-faktor konvensional seperti faktor sosiologis, psikologis, dan praktik politik uang. Hasil kajian mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang turut berperan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih salah satunya yaitu faktor etnisitas. Perilaku pemilih dari kelompok etnis tertentu seperti *Chinese Ethnic Youth* dipengaruhi oleh faktor etnisitas dalam memilih kandidat. Faktor ideologi juga dapat memainkan peran penting dalam perilaku pemilih (Jama, dkk., 2021; Khairunnas, dkk., 2018). Preferensi ideologi dan karakteristik pribadi seperti keterbukaan terhadap pengalaman, kesungguhan, dan keramahan dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih.

Faktor agama dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan. Faktor-faktor seperti literasi politik, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lingkungan di sisi lain juga

dapat mempengaruhi perilaku pemilih (Fernardo, 2022). Hal ini untuk Pemilu memahami secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Temanggung. Pertimbangan penting mengenai berbagai aspek yang telah diteliti dalam literatur, termasuk faktor etnisitas, ideologi, agama, literasi politik, kondisi ekonomi, dan faktor lingkungan. Integrasi dari berbagai faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap perihal pola perilaku pemilih di daerah tersebut.

Perilaku pemilih dalam menentukan calon pemimpin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor atau alasan yang mempengaruhi pemilih salah satunya yaitu faktor sosial dan proses sosialisasi (Jama, dkk., 2021). Faktor etnis juga dapat mempengaruhi pemilih generasi milenial dan generasi Z khususnya dari etnis Tionghoa dalam kontestasi Pilkada Walikota Palembang (Khairunnas, dkk., 2018). Faktor psikologis dan sosiologis turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih (Fernardo, 2022). Perilaku pemilih dalam pemilihan umum sangat ditentukan oleh imbalan yang diberikan oleh calon kandidat sebagai timbal balik karena masyarakat telah mendukung calon tersebut. Hal ini didukung dengan adanya data yang menunjukkan tingkat harapan masyarakat untuk memperoleh timbal balik dari calon kandidat sebagaimana disajikan dalam gambar 3.



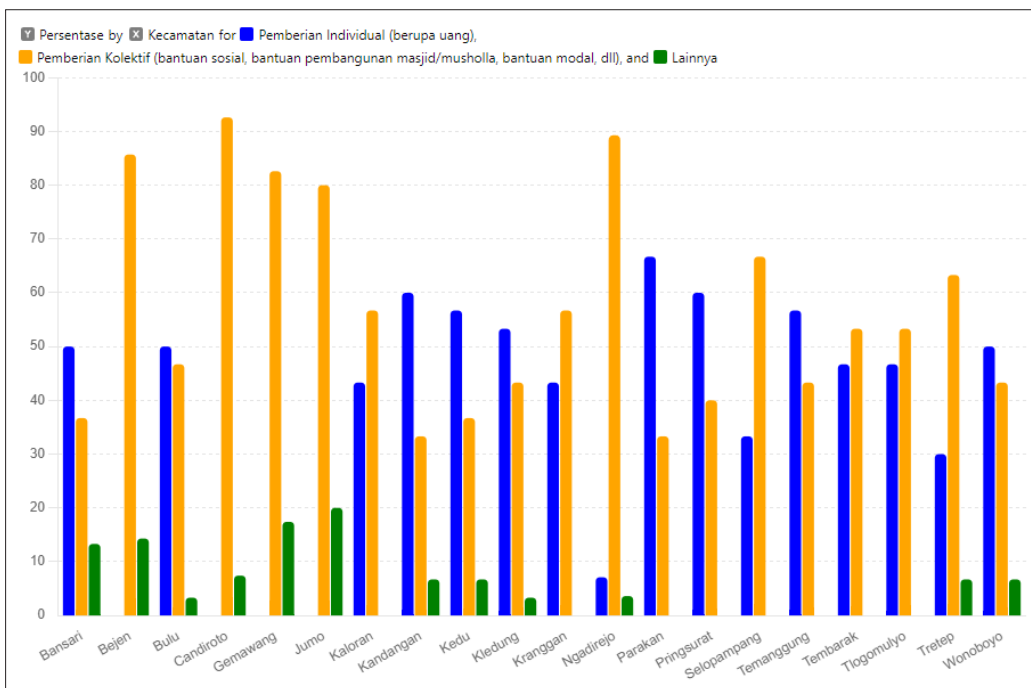
**Gambar 3** Tingkat Harapan Masyarakat Kabupaten Temanggung untuk Memperoleh Imbalan dari Calon Kandidat

Berdasarkan data yang disajikan dalam gambar 3 menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Temanggung tidak sepenuhnya mengharapkan pemberian dari calon kandidat sebagai preferensi dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang sangat mengharapkan adanya pemberian dari calon kandidat yaitu dari Kecamatan Ngadirejo dengan persentase 90%, Kecamatan Candiroto dengan persentase 83,3%, Kecamatan Jumo dengan persentase 80%, serta Kecamatan Temanggung dengan persentase 70%. Masyarakat yang tidak mengharapkan pemberian dari calon kandidat diantaranya yaitu di Kecamatan Bejen dan Gemawang dengan persentase 36,7% yang lebih tinggi dari kecamatan lainnya. Masyarakat di Kecamatan Bansari dan Kledung dengan persentase 60%, serta Kecamatan Kedu dengan persentase 56,7%, Kecamatan Kandangan dan Wonoboyo dengan persentase 50% cenderung tidak mengetahui adanya pemberian dari calon kandidat untuk mempengaruhi preferensi pemilih di Kabupaten Temanggung. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu kondisi sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, atau faktor kebiasaan yang telah menjadi budaya di wilayah tersebut.

Masyarakat di Kabupaten Temanggung secara umum sangat berharap untuk memperoleh pemberian dari calon kandidat dalam pemilihan

umum sebagai salah satu preferensi dalam menentukan pilihan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memperoleh timbal balik dari calon kandidat. Jenis pemberian yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pemberian individual berupa uang, pemberian kolektif berupa bantuan sosial, pembangunan masjid, modal, serta bentuk pemberian lainnya. Jenis pemberian dari calon kandidat yang diharapkan sekaligus mempengaruhi perilaku pemilih pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung disajikan dalam gambar 4.

Pemberian dari calon kandidat menjadi salah satu preferensi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Masyarakat di Kecamatan Candiroto dengan persentase sebesar 92,6% lebih memilih pemberian kolektif seperti bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid/mushola, dan bantuan modal sedangkan 7,4% memilih kategori lainnya. Preferensi serupa terlihat di Kecamatan Gemawang dengan persentase 82,6%, Kecamatan Jumo dengan persentase 80%, dan Kecamatan Bejen dengan persentase 85,7%. Hal ini tidak berlaku di Kecamatan Parakan yang cenderung memilih pemberian individual berupa



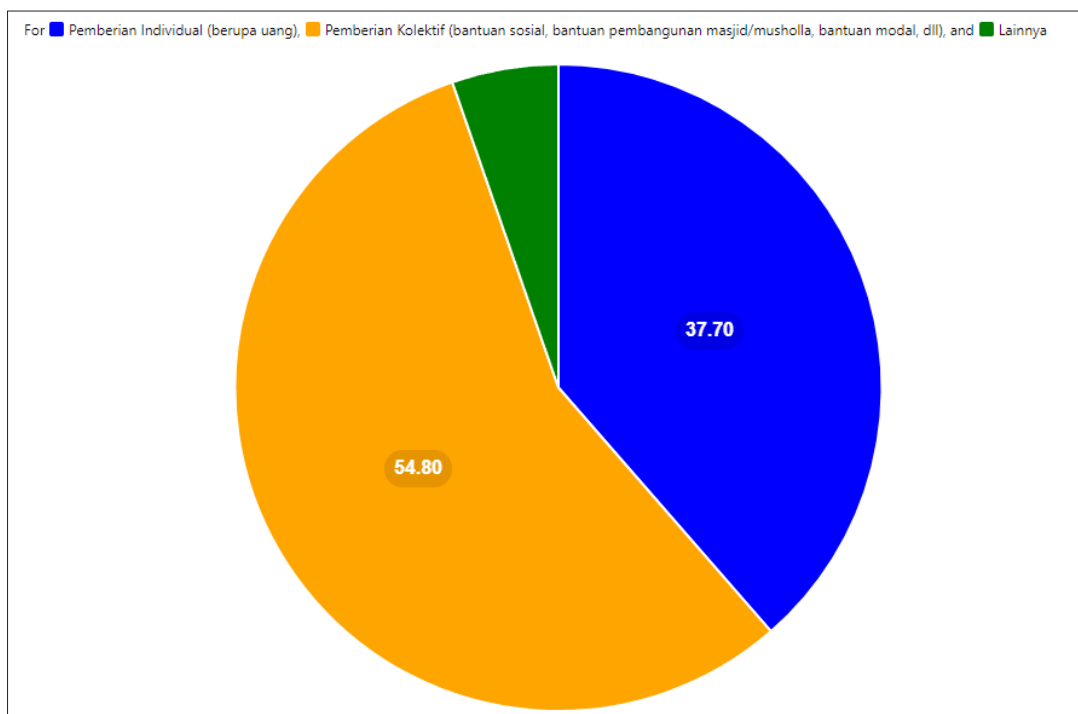
**Gambar 4** Jenis Pemberian dari Calon Kandidat yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

uang dengan persentase 66,7%. Masyarakat di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kedu menunjukkan kecenderungan yang sama dengan masing-masing persentase 60% dan 56,7% memilih jenis pemberian individual sebagai faktor penentu pilihan politik. Pemberian dengan kategori lainnya memiliki persentase yang lebih rendah di semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Jumo dengan persentase 20% dan Kecamatan Gemawang dengan persentase 17,4% menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis pemberian dari calon kandidat sangat mempengaruhi pilihan politik di Kabupaten Temanggung. Perbedaan preferensi di berbagai kecamatan mencerminkan dinamika politik lokal yang menunjukkan bahwa strategi kampanye harus mempertimbangkan kecenderungan dari masing-masing kecamatan. Data mengenai jenis pemberian yang paling mempengaruhi preferensi pemilih disajikan dalam gambar 5.

Data yang disajikan dalam gambar 5 menunjukkan bahwa jenis pemberian dari calon kandidat yang paling menentukan pilihan politik masyarakat di Kabupaten Temanggung yaitu pemberian kolektif berupa bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid atau mushola, dan bantuan modal. Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebanyak 329 orang dengan

persentase 54,8% memilih pemberian kolektif sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik, sebanyak 226 orang dengan persentase 37,7% memilih pemberian individual berupa uang, sebanyak 31 orang dengan persentase 5,2% memilih kategori lainnya, serta sebanyak 14 orang dengan persentase 2,3% tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemberian kolektif berupa bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid atau mushola, dan bantuan modal lebih efektif untuk mempengaruhi preferensi pemilih di Kabupaten Temanggung.

Kajian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Preferensi ideologi dan faktor kepribadian seperti keterbukaan dan kesungguhan sangat berperan penting (Nugroho, Tobing, dan Supriyadi 2022; Jati, 2022). Politik uang juga mempengaruhi meskipun tidak selalu efektif di beberapa daerah (Hawing dan Hartaman, 2021). Usia menjadi faktor dominan karena pemilih cenderung memilih berdasarkan kedekatan personal (Hasibuan, 2019). Faktor internal seperti kesadaran warga negara dan ikut-ikutan turut berpengaruh (Ilyas dan Maimun, 2021). Literasi politik dan latar belakang etnis turut mempengaruhi perilaku pemilih (Fajrin dan Erlinda, 2022; Simanjuntak dan Fernandes, 2022). Faktor psikologis dan kecenderungan memilih berdasarkan figur serta partai pengusung



**Gambar 5** Jenis Pemberian Calon Kandidat yang Mempengaruhi Preferensi Pemilih

menambah kompleksitas perilaku pemilih (Juri dan Sugianto 2020; Daud, 2015). Media sosial di era digital seperti saat ini sangat berpengaruh dalam membentuk opini dan preferensi pemilih terutama di kalangan pemilih muda (Fajrin dan Erlinda, 2022). Keragaman faktor tersebut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemberian Caleg memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Informasi yang diberikan oleh para Caleg dapat menjadi referensi utama bagi pemilih dalam memilih dan menentukan arah pilihan politik (Hasanuddin, dkk., 2021). Pengalaman informasi yang diperoleh melalui media sosial juga memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman politik pemilih, terutama menentukan pilihan kepada calon presiden dan wakil presiden (Prasetyawan, 2020). Dampak pemberian Caleg di Kabupaten Temanggung sangat signifikan dalam menentukan pilihan politik masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat legitimasi pemerintah terpilih. Pemberian kolektif seperti bantuan sosial dan pembangunan masjid, lebih berpengaruh dibandingkan pemberian individual berupa uang, menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kontribusi jangka panjang. Pemberian bantuan ini di sisi lain dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sekaligus mempengaruhi persepsi dan pemahaman politik pemilih. Informasi yang diberikan melalui pemberian Caleg sering menjadi referensi utama bagi pemilih, dengan media sosial memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman politik. Penting untuk memastikan pemberian ini dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari praktik korupsi dan politik uang yang dapat merusak integritas proses Pemilu dan demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Temanggung menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan proses demokrasi. Mayoritas responden percaya akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap proses politik tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap pemerintahan yang terpilih. Hal ini penting untuk menjaga

legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Temanggung menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan proses demokrasi. Mayoritas responden percaya akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu tidak hanya mencakup proses pemilihan, tetapi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan literasi politik, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memastikan representasi kepentingan warga dalam proses politik (Hasyim, 2023). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi kedaulatan rakyat, yang tercermin dalam keterlibatan warga dalam pesta demokrasi seperti Pemilu (Wardhani dan Sukma, 2018). Tingkat partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan Pemilu karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih (Amin, Ikramatoun, dan Halik, 2021). Partisipasi politik masyarakat, terutama dalam Pemilu, menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi dan memperkuat fondasi negara sebagai negara demokratis.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula, sosialisasi Pemilu, dan pelatihan partisipasi politik merupakan langkah kritis dalam memastikan partisipasi politik yang aktif dan berdampak positif bagi generasi muda serta masyarakat secara keseluruhan (Nababan, 2024; Kelibay, dkk., 2023; Mahyudin, dkk., 2022). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti sosialisasi Pemilu, pelatihan pemilih pemula, dan penguatan gerakan sadar demokrasi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan partisipatif dalam proses politik, terutama dalam Pemilu (Kelibay, dkk., 2023; Nababan, 2024; Mahyudin, dkk., 2022). Hal ini menunjukkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator keberhasilan proses demokrasi, tetapi juga merupakan cerminan dari kesadaran politik dan keterlibatan aktif warga dalam menjaga demokrasi, memastikan representasi kepentingan masyarakat, dan memperkuat pondasi negara sebagai negara demokratis.

Keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi fokus penting, terutama dalam konteks

modal yang dimiliki oleh Caleg perempuan di tengah politik patriarki. Analisis terhadap kasus-kasus seperti pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik (Ramadhany dan Rahmawati, 2020). Partisipasi politik disisi lain menjadikan masyarakat sebagai aspek krusial dalam Pemilu. Pembentukan pemahaman tentang keterlibatan politik menjadi unsur krusial dalam dinamika demokrasi (Arniti, 2020). Kekuatan ekonomi dalam konteks politik juga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam memenangkan pertarungan politik elektoral. Kekuatan ekonomi dalam oligarki menjadi elemen kunci dalam menentukan kemenangan dalam kontestasi politik (Assidiq dan Triguswinri, 2021) Fragmentasi politik dan habitus juga memainkan peran dalam persaingan antara sesama Caleg, terutama dalam konteks persaingan etnis (Sinaga dan Adam, 2021). Hal ini sering terjadi pada penyelenggaraan Pemilu di beberapa wilayah.

Peran politik hukum sangat signifikan dalam membentuk prinsip-prinsip hukum di suatu negara. Politik hukum menjadi pijakan utama dalam proses penetapan dan pengembangan nilai-nilai hukum secara nasional (Idrus dan Fadila, 2022). Kontestasi politik pada masyarakat desa juga memberikan gambaran tentang dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal, termasuk faktor-faktor seperti soliditas tim sukses Caleg dan biaya politik yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan (Amin, Nazaruddin, dan Akmal, 2020). Pemberian Caleg tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada pemilih, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang melibatkan berbagai faktor seperti gender, ekonomi, dan hukum. Pilihan politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks, yang memerlukan pemahaman mendalam untuk dapat menginterpretasikan dinamika politik secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara Caleg dan pemilih tidak hanya terbatas pada masa kampanye, tetapi juga berlanjut dalam bentuk hubungan patron-klien yang dapat mempengaruhi preferensi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Pemahaman tentang faktor-faktor ini menjadi krusial bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat legitimasi.

## SIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam Pemilu menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang konsisten di atas 80%. Masyarakat di Kabupaten Temanggung dengan persentase 66,7% telah mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu karena percaya terhadap pentingnya partisipasi politik. Jenis pemberian dari calon kandidat yang paling menentukan pilihan politik masyarakat di Kabupaten Temanggung yaitu pemberian kolektif berupa bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid atau mushola, dan bantuan modal. Masyarakat Kabupaten Temanggung dengan persentase 54,8% cenderung memilih pemberian kolektif, 37,7% memilih pemberian individual berupa uang, serta 5,2% memilih kategori lainnya sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik diantaranya yaitu faktor sosiologis, psikologis, etnisitas, ideologi, agama, literasi politik, dan kondisi ekonomi. Partisipasi politik yang inklusif dan representatif diperlukan untuk memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, T. W., Prajarto, N., & Guntoro, B. (2014). Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kawistara*, 4(3), 225-330.
- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Mediapsi*, 4(1), 1-6.
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114-127.
- Amin, K., & Akmal, N. (2020). Kontestasi Politik pada Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Pemilu Legislatif 2019 di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan). *Jurnal Wacana Politik*, 5(2), 1-10.
- Amin, K., & Ikramatoun, S. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2(3), 166-176.
- Amrullah, A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam

- Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. *Perspektif*, 10(2), 321-344.
- Anugerah, B. (2022). Strengthening Democracy in Indonesia: Comparison Between Representative and Direct Presidential Election Policies. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(1), 1-16.
- Arifin, M. R. (2023). Pemanfaatan Digi-Edvot sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat (Upaya Peningkatan Literasi Politik pada Penyandang Disabilitas). *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(4), 231-241.
- Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(4), 281-290.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Assidiq, F., & Triguswinri, K. (2021). Kontestasi Politik Perempuan dalam Diskursus Gender dan Ekonomi Politik. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(11), 697-706.
- Daud, M. (2015). Prediktor Perilaku Pemilih pada Pemilukada: Perspektif Psikologi Politik. *Jurnal Psikologi Talenta*, 1(1), 87-96.
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19. *Publik*, 8(2), 156-169.
- Fajrin, O., Erlinda, S., & Hariyanti, H. (2022). Rumah Pintar Pemilu Kampar dan Peningkatan Literasi Politik Peserta Didik Tingkat SMA. *Journal of Civic Education*, 5(4), 476-483.
- Fernando, E. (2022). Mediatisasi Politik dan Perilaku Pemilih: Penggunaan Google Trend sebagai Metode Alternatif Memprediksi Kemenangan Kandidat. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 14-26.
- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1-10.
- Hasanuddin, H., Marta, A., & Asrida, W. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi: Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 59-67.
- Hasanuddin, H., Rizaldi, A., Marta, A., & Ishak, I. (2021). Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih: Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 143-151.
- Hasibuan, M. I. (2015). Faktor-Faktor Mempengaruhi Perilaku Memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu (Studi Kasus Kecamatan Rantau Selatan). *Ecobisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 67-83.
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 187-200.
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance*, 3(1), 45-53.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKn*, 2(1), 37-51.
- Heriyanto, U. N. H., Zain, D., Sunarsih, S., Novieyana, S., Nurmala, N., & Prestoroika, E. (2023). Pelatihan Pemilih Pemula dalam Rangka Memberikan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilu untuk Peningkatan Partisipasi Mahasiswa pada Gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Pontianak. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 5(2), 1-9.
- Huda, H. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 7(2), 434-442.
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Legal Analysis of Money Politics Crimes in General Election Law. *Journal Neolectura*, 2(1), 34-39.
- Ilyas, A., & Maimun, M. (2021). Perilaku Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 2(1), 1-16.
- Ismail, L., Juleha, Hs, N. F. R., Ikhsan, F.,

- Wahyuddin, & Wahyudi, D. (2024). Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024: Pemilu, Pemilih, Transformasi. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1-8.
- Jama, S. R., Wiyono, S., & Hady, N. (2021). Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 290-301.
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70-84.
- Juri, J., & Sugianto, R. (2020). Analisis Perilaku Pemilih di Kelurahan Kedabang Kecamatan Sintang pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 133-147.
- Kause, W. L. (2020). Pengambilan Keputusan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Flobamora*, 2(2), 12-19.
- Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018). Chinese Ethnic Youth's Voting Behavior in the 2018 Palembang Mayoral Election. *Journal of Moral and Civic Education*, 2(2), 77-91.
- Kusuma, I. W. M. W., Raka, A. G., & Sumada, I. M. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, di Desa Cunggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 12-19.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, 3(2), 1-15.
- Mahfud. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahpudin, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 113-128.
- Mahyudin, M., Sa'ban, L. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 158-164.
- Malik, A., Syaripuddin, S., & Harianto, H. (2022). Voter's Education dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Duampanua. *Jurnal Sipissangngi*, 2(1), 18-24.
- Nugroho, A. T., Tobing, D. H., & Supriyadi, S. (2022). Preferensi Ideologi dan Perilaku Politik Pemilih pada Pilpres 2019: Asosiasi antara Openness to Experience, Conscientiousness, Agreeableness, dan Otoritarianisme Sayap Kanan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 9(1), 1-13.
- Oktavia, S., & Saharuddin. (2013). The Relationship Between Role of the Stakeholders and Community Participation in Agropolitan Program in Karacak Village, Leuwiliang Subdistrict, Bogor District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 1-16.
- Prasetyawan, Y. Y. (2020). Pengalaman Informasi Pemilih Pemula Menggunakan Media Sosial sebagai Sarana Pembelajaran Politik dalam Menentukan Pilihan Calon Presiden. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 8(1), 1-21.
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *Journal of Public Sector Innovations*, 5(2), 68-79.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62.
- Rasyadi, V., & Nasdian, F. T. (2021). Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat dengan Dampak Ekonomi Lokal dalam Pengembangan Kawasan Wisata Mandeh. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(3), 360-372.
- Rush, M., & Althoff, P. (1971). *An Introduction to Political Sociology*. London: Nelson.
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 7(51), 1-14.
- Sari, A. E., Amri, F., & Yusnita, I. (2020). Pengaruh Reward terhadap Knowledge Sharing Perangkat Desa Berdampak Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Manajemen*, 3(2), 104-118.
- Simanjuntak, D. F., & Fernandes, R. (2022). Perilaku Pemilih Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 343-352.
- Sinaga, R. S., & Adam, A. (2021). Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 310-332.
- Srikandi, M. B., & Wijaya, W. (2024). Pendampingan Verifikasi DPT Online melalui Media Brosur. *Jurnal Comunita Servizio*, 6(1), 134-143.
- Wardhani, P. S. N., & Sukma, P. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18.